



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



**Bappebti Tetapkan
Bursa & Kontrak PALN** ■

**Pembiayaan SRG
Makin Meningkatkan** ■

**Demutualisasi
Peluang Merger
Dengan Bursa Asing** ■

WPB PROFESIONAL CERMIN MAJUNYA PBK

LICENSE

DARI REDAKSI

Citra positif dan professional Wakil Pialang Berjangka (WPB) merupakan cermin majunya industri perdagangan berjangka komoditi. Demikian tegas Kepala Bappebti, Deddy Saleh, dalam sambutannya pada acara penataan dan penyegaran WPB, baru-baru ini di Surabaya, Jatim.

Oleh karena itu, dikatakan Deddy, WPB harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan dan kemampuan teknis transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Apa yang diutarakan Deddy Saleh, itu, bukan tidak beresalan. Sebab, garda terdepan industri perdagangan berjangka komoditi tanah air ada ditangan WPB. Masyarakat sebagai investor bertransaksi perdagangan berjangka adalah hasil kerja keras WPB.

Makanya, profesi ini pantas mendapat perhatian lebih dari otoritas, demikian juga bursa dan tentunya perusahaan pialang berjangka. Perhatian itu tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan profesional WPB. Karena, mustahil kemampuan itu datang tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait.

Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan, saat ini profesi yang harus mendapatkan izin dari Bappebti diindustri perdagangan berjangka komoditi tanah air hanyalah WPB. Sesungguhnya masih ada profesi lain yang harus mendapat izin Bappebti, yakni Penasihat Berjangka. Namun, profesi ini belum tampak penting karena likuiditas bursa masih rendah.

Oleh sebab itu pula, Bappebti telah berencana untuk melakukan penyegaran WPB secara regular.

Mengingat izin WPB sudah mencapai 3.000 orang\ WP dikeluarkan Bappebti. Meski yang tertampung diindustri perdagangan berjangka hanya sekitar 60 %.

Tindaklanjut dari penyegaran itu, Bappebti akan menata ulang izin WPB. Seperti, menetapkan masa batas berlakunya izin WPB. Setelah melampaui masa batas, WPB wajib kembali mengikuti test profesi.

Hal lain yang menjadi laporan menarik pada edisi ini, datangnya inisiatif dari legislatif khususnya Komisi VI DPR-RI, yang mengusulkan perdagangan kontrak berjangka emisi karbon. Inisiatif itu sungguh jauh meneropong ke masa depan. Mengingat kontrak berjangka emisi karbon masih langka ditemukan di bursa berjangka dunia.

Tetapi, posisi Indonesia yang merupakan salah satu paru-paru dunia, memiliki kepentingan untuk menjaga kelestarian alam di tengah isu pemanas global.

Oleh karena itu, inisiasi amandemen UU No.32/1997, datang dari Senayan agar kontrak emisi karbon dapat diperdagangkan di Indonesia. Dengan amandemen itu,

terbuka pula peluang bagi bursa berjangka untuk memperdagangkan kontrak berjangka lain yang tidak berwujud. Seperti, jasa dan suku bunga bank.

Laporan lengkap tentang isu pokok amandemen undang-undang di bawah payung Bappebti, yang datang dari DPR ada pada wawancara khusus bersama Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir. Di samping itu, masih terdapat berbagai laporan menarik lainnya yang semata-mata menambah wawasan dan pengetahuan pembaca budiman. Salam! ▲



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi **Penasihat/Penanggung Jawab:** Deddy Saleh
Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan
Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapi Siswantoro, Katimin.
Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

9-10 **Resi Gudang** Master Plan Gudang Pangan



22-23 **Komoditi**

Pepaya Sahabat Sehat



28 **KIPRAH** **Tetti Erlinda Gultom** 'Nyonya Besar' MPF Medan



Laporan Utama 4-5

- WPB Profesional Cermin Majunya PBK
- Bappebti Tetapkan Bursa & Kontrak PALN

Berjangka 6-8

- Bappebti Evaluasi Pelaku Pasar

Aktualita 12-13

- Belum Saat Tepat Bappebti Masuk OJK
- Izin Pandu Dicabut, Mega 'Berkibar'
- ISI Serak Fisik Emas
- BAKTI Ambil Keputusan Perdana

Agenda 14-15

Interview 16-17

- Alfons Samosir ; Amandemen Undang-Undang Menyetujui Rakyat Petani

Pasar Lelang 18-19

- iPasar Resmi Penyelenggara Lelang Forward
- PLKA Jakarta Miliki Agro Outlet

Market 20

- Cina Tingkatkan Pembelian, Harga Karet Meningkatkan
- Produksi Indonesia Naik, Harga Kopi Global Anjlok

Info Harga 21

Wawasan 24-25

- Prosedur Pengajuan Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang

Kolom 26-27

- Bursa Berjangka & Pengelolaan Resiko



WPB harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap peraturan dan kemampuan teknis transaksi perdagangan berjangka komoditi. Citra positif & profesional WPB merupakan cermin majunya industri perdagangan berjangka komoditi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak tahun 2000 telah mencetak Wakil Pialang Berjangka (WBP) sebagai ujung tombak industri perdagangan berjangka komoditi, mencapai 3.000 izin. Namun, hampir 60 % izin yang dikeluarkan itu tidak digunakan pada industri perdagangan berjangka, atau berbagai alasan lainnya.

Terkait dengan itu, WPB akan ditata kembali izin yang telah dikeluarkan Bappebti. Misalnya, ada masa kadaluarsa izin yang dikeluarkan. Dan untuk memperpanjang dan memperoleh kembali izin WPB dari Bappebti, diwajibkan mengikuti test ulang.

Langkah awal yang ditempuh untuk menata ulang WPB, pada 18 Oktober 2010, di Surabaya, Jatim, Bappebti menyelenggarakan penyegaran. Acara ini diikuti sebanyak 175

WPB dari 40 perusahaan pialang berjangka.

Pada perhelatan itu, sebelum diberikan pengetahuan dasar dan materi pokok peraturan terkait perdagangan berjangka komoditi, WPB diuji kemampuannya dengan mengikuti test. Benar saja. Nilai WPB jeblok, rata-rata dibawah 45 % dari materi ujian.

Setelah ujian dilaksanakan, barulah disampaikan pengetahuan dasar dan materi pokok peraturan perdagangan berjangka komoditi. Narasumber pada acara ini antara lain, Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir, Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Retno Rukmawaty, Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, Dirut BKDI, Megain Widjaya, Direktur BBJ, Bihar Sakti Wibowo, Wakil Ketua BAKTI, Achmad Djauhari. Serta, pelaku pasar lainnya, seperti, Ketua APBI, I Gde Rakatantra, Direksi PT

Askab, Kristiantiono, dan pemerhati PBK, Sahala Siringoringo

Dan untuk menguji kembali pengetahuan WPB, pada sore hari juga diselenggarakan test di tempat yang sama. Hasil test tersebut cukup signifikan, menjadi rata-rata 70 %.

Direncanakan, Bappebti juga akan menyelenggarakan acara yang sama di Bandung, Jabar, pada bulan November 2010 mendatang.

“Penataan ulang WPB ini sudah mendesak. Karena banyak WPB yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil pialang. Oleh sebab itu, perlu juga ditinjau masa berlaku izin wakil pialang,” demikian antara lain dikatakannya Kepala Bappebti, Deddy Saleh.

Menurut Deddy, penataan itu dimulai dengan WPB mengikuti pelatihan tentang undang-undang, peraturan, aspek kontrak berjangka komoditi dan lainnya. “Yang terpenting lagi, mereka harus tahu apa saja tugas pokok dan kewajiban seorang wakil pialang.”



“Kegiatan ini seharusnya reguler dilakukan oleh asosiasi. Tetapi karena asosiasi belum memiliki kekuatan hukum di industri ini, maka diprakarsai oleh Bappebti. Namun semua unsur dilibatkan, seperti bursa, lembaga kliring, asosiasi dan BAKTI,” katanya.

Citra WPB

Lebih jauh dipaparkan Deddy Saleh, bagian lain dari pembangunan citra perdagangan berjangka komoditi yang lebih positif adalah penyempurnaan peraturan. Seperti diketahui, industri perdagangan berjangka sudah berusia 10 tahun, dan selama itu pula cukup banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti.

“Seiring dengan itu, WPB pun harus mengetahuinya dan benar-benar mematuhi. Jadi, acara ini adalah untuk menyegarkan kembali ingatan WPB terhadap peraturan yang ada. Dengan demikian menguasai berbagai peraturan, teknik-teknik bertransaksi dan aspek bisnisnya.”

“Industri ini harus diisi pelaku profesional yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas. Hal itu pula yang menjadi modal bagi WPB untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. WPB juga harus memiliki citra

yang baik dimasyarakat. Sehingga profesi ini menjadi primadona pencari kerja. Jadi, itulah cita-cita kita bersama untuk terus memperbaiki perdagangan berjangka komoditi,” kata Deddy.

Karena bagaimana kita bisa mempunyai keyakinan jika industri ini tidak dipercaya oleh masyarakat. Bila ada kesan-kesan selama ini yang kurang baik, harus kita perbaharui dan kita jaga eksistensinya. Saya berharap pelaku yang ada di industri ini me-



miliki niat yang baik untuk memajukannya. Tetapi kalau ada pihak-pihak yang tidak memiliki niat baik, dengan berat hati kita akan mengeluarkan

dari industri ini. Kita harus menjaga industri ini bersih.

Di negara liberal mana pun, tambah Deddy, peraturan itu adalah koridor yang harus dipatuhi untuk berjalannya industri ini. Jadi tidak ada ruginya kita meningkatkan pengetahuan.

WPB Bonek

Di beberapa negara, seperti Malaysia, peningkatan pengetahuan WPB seperti ini dilakukan setiap tahun. Tidak mungkin WPB bisa meyakinkan dan menjelaskan kepada masyarakat kalau tidak memiliki pengetahuan yang lengkap terhadap aturan bisnis ini.

Perkembangan industri ini cukup dinamis. Sehingga peraturannya pun selalu mengikuti perubahan pasar.

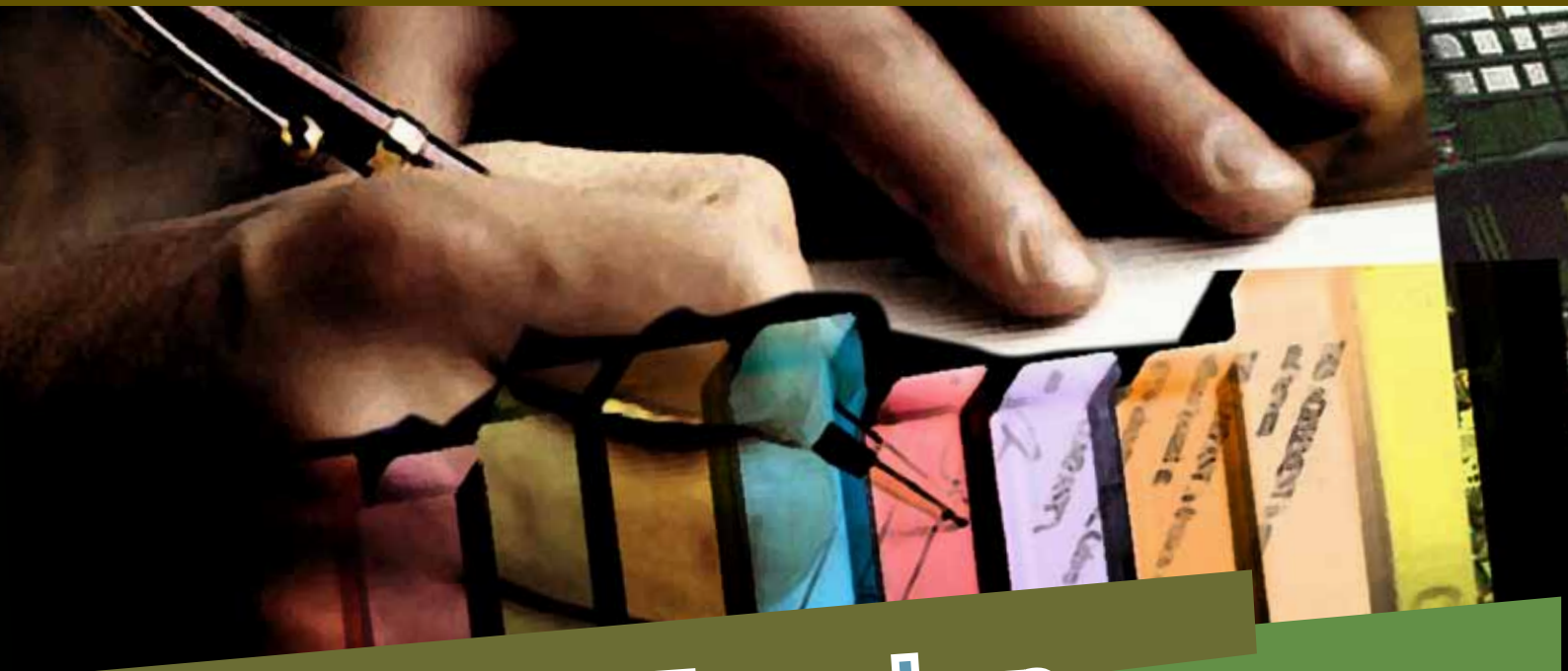
“Jadi, WPB- lah yang memajukan industri karena mereka yang langsung berhadapan dengan investor. Sedangkan Bappebti, bursa dan kliring adalah yang menyediakan lapangan dan menjaga industri ini sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Deddy Saleh.

“Kita tidak mengharapkan ada WPB Bonek- bondo nekat, supporter fanatik Persebaya. Tidak boleh ada itu, WPB yang modal nekat. Karena itu yang bisa merusak industri ini,” seloroh Deddy.

Nantinya, kita juga mendorong agar WPB memiliki asosiasi atau paguyuban. Karena organisasi seperti itu banyak manfaatnya, baik untuk alat penekan maupun sarana menyalurkan aspirasi guna memajukan industri ini.

“Dalam rangka menyediakan sarana yang kondusif itu, saat ini

UU No.32/1997, sudah diamankan. Dan undang-undang hasil amandemen, akan mengakui asosiasi sebagai mitra pemerintah. ▲



Bappebti Tetapkan Bursa & Kontrak PALN

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) setelah mengeluarkan kebijakan No. 82/ Bappebti/ Per/04/2010, tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri, Kepala Bappebti kembali mengeluarkan kebijakan pendukung. Yakni, SK Kepala Bappebti, No. 84/Bappebti/ per/09/2010, tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri. Kebijakan itu ditetapkan pada 22 September 2010.

Pada kebijakan itu, ditetapkan sebanyak 27 bursa berjangka luar negeri dan 182 kontrak berjangka untuk transaksi Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN). Dan sesuai dengan aturan utamanya, PALN sudah bisa ditransaksi per 1 Oktober 2010. Namun sebelumnya, perusahaan pialang berjangka yang akan mentransaksikan PALN harus daftar ulang sebelum 31 September 2010. Hal ini berlaku bagi perusahaan pialang berjangka yang sudah

terdaftar dalam transaksi PALN sesuai aturan lawas.

Sebagaimana diatur pada Undang-undang No.32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, Pasal 6, Bappebti berwenang menetapkan bursa berjangka luar negeri berikut dengan kontrak berjangkanya. Dan dalam penjelasan Pasal 6 ayat C, jenis kontrak berjangka dari bursa luar negeri mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia dan kontrak berjangka tersebut harus likuid.

Menurut Kepala Bappebti, Deddy Saleh, pemilihan bursa berjangka dan kontraknya mempertimbangkan kredibilitas dan likuiditas. Di samping itu, bursa yang terpilih sudah teruji kemampuannya dalam mengembangkan kontrak berjangka.

"Jadi, daftar bursa dan kontrak berjangka itu sebagai rujukan bagi bursa lokal dan pialang dalam transaksi PALN," jelas Deddy Saleh.

"Kami juga mengkaji kontrak apa yang sudah diperdagangkan di bursa lokal. Kalau tidak ada di lokal, baru boleh. Itu pun, pertimbangannya

kontrak tersebut diperlukan di dalam negeri. Seperti kontrak berjangka komoditi gandum, kapas, kedelei, kebutuhannya cukup tinggi untuk industri," ungkapnya.

Dan perlu diketahui, tambah Deddy, transaksi PALN hanya sebagai transisi sebelum bursa lokal memperdagangkan kontrak yang sama.

Fokus

Sementara itu, dari kalangan pelaku pasar tampak ada rasa kecewa karena kontrak berjangka yang direkomendasikan Bappebti, kontrak keuangan tidak masuk dalam skema PALN. Sebab, sebelum daftar itu disodorkan Bappebti sudah beredar wacana kontrak keuangan akan termasuk dalam PALN.

Menanggapi hal itu, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, dengan singkat mengatakan, tidak beralasan kontrak keuangan masuk dalam skema PALN.

"Kita harus fokus pada kontrak komoditi primer. Karena itu juga amanat dari undang-undang," kata Deddy.

Selain itu, tambah Deddy, Bappebti sudah mendorong perusahaan

Daftar Bursa Transaksi PALN

Bursa

Kontrak Berjangka

pialang berjangka untuk membentuk unit commodity desk di setiap perusahaan. Unit itu nantinya harus konsentrasi pada transaksi kontrak komoditi primer. "Jadi kalau kontrak keuangan dimasukkan dalam sekema PALN, mau dikemanakan. Karena kontrak itu bukan kontrak yang diperdagangkan di luar bursa."

Hal yang senada juga diutarakan Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Retno Rukmawati, "pada dasarnya, kontrak PALN hanya sekedar memramakan bursa. Kalau bursa lokal sudah memiliki kontrak yang likuid, untuk apa kita bertransaksi di luar negeri."

"Makanya Bappebti terus mendorong bursa lokal menciptakan kontrak berjangka yang diminati pasar, tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Harusnya, energi kita dikonsentrasikan saja pada kontrak berjangka yang ditawarkan di bursa lokal," kata Retno.

Dan ditambahkannya, kalau kontrak berjangka dari bursa lokal maju dan diperdagangkan di bursa luar negeri, 'kan lebih baik. Kita pun bisa bangga sebagai bangsa yang kaya akan komoditi unggulan. ▲

1. Chicago Mercantile Exchange (CME)	46
2. International Continental Exchange (ICE)	10
3. Osamex (merger C-Com Central Japan Commodity Exchange)	5
4. NYSE Liffe Euronext	11
5. NYSE Life US	5
6. Tocom (Tokyo Commodity Exchange)	10
7. Tokyo Grain Exchange (TGE)	8
8. Singapore Commodity Exchange (SICOM)	3
9. Agriculture Futures Exchange of Thailand (AFET)	1
10. European Exchange (Eurex)	3
11. London Metal Exchange (LME)	9
12. Dalian Commodity Exchange (DCE)	4
13. Shanghai Futures Exchange (SHFE)	6
14. Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE)	6
15. Multi Commodity Exchange of India (MCX)	12
16. Singapore Exchange (SGX)	2
17. Singapura Mercantile Exchange (SMX)	1
18. Australian Securities Exchange (ASX)	9
19. Kansai Commodity Exchange (KEX)	5
20. Bolsa de Volares, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo (BM&FBOVESPA)	7
21. Minneapolis Grain Exchange (MGEX)	1
22. European Energy Exchange (EEX)	4
23. Dubai Mercantile Exchange (DME)	1
24. Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)	5
25. National Commodity Exchange Limited of Pakistan (NCEL)	2
26. South African Futures Exchange (SAFEX)	3
27. Turkish Derivatives Exchange (Turdex)	2

Bappebti Evaluasi Pelaku Pasar

Bappebti akan bekukan izin usaha jika tidak memenuhi ketentuan yang sudah dipersyaratkan peraturan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) saat ini masih memberi toleransi bagi pelaku perdagangan berjangka komoditi yang belum memenuhi ketentuan sesuai yang dipersyaratkan peraturan. Batas waktunya hingga 31 Desember 2010. Lewat dari itu, Bappebti akan tegas menindak pelaku pasar dengan memberi sanksi pembekuan izin usaha.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, terkait dengan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi.

Sebagaimana diketahui, per 1 September 2010, perusahaan pialang berjangka wajib melakukan transaksi multilateral minimal 5 persen dari total transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA). Di samping itu, per 1 Oktober 2010, perusahaan pedagang penyelenggara SPA diwajibkan terkoneksi dengan Sistem Pengawasan Tunggal (SPT) yang disediakan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

"Kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh pelaku pasar untuk menyampaikan laporan dan evaluasi penggunaan sistem. Baik untuk transaksi multilateral maupun SPA. Dan, dari laporan itu kita akan pelajari dan mengambil tindakan apa yang harus dilakukan," jelas Deddy Saleh.

"Tidak boleh ada yang disembunyikan, akhirnya juga nanti akan ketahuan. Dan sanksinya lebih berat. Batasnya sampai 31 Desember 2010. Kalau tidak, kami akan bekukan izinnya agar tidak bisa beroperasi," tegas Deddy Saleh.

"Surat itu pun termasuk diberikan kepada perusahaan pialang berjangka pasif. Mengapa mereka tidak aktif bertransaksi? Kalau memang tidak sanggup lagi lebih baik dibubarkan saja. Pada dasarnya kita tidak perlu banyak perusahaan pialang dan pedagang berjangka, yang perlu itu investornya," papar Deddy.

Sementara ini, dari laporan yang saya terima, tambah Deddy Saleh, diketahui memang sudah ada peningkatan transaksi multilateral. Tetapi itu pun jangan main-main, hanya untuk memenuhi kewajiban. Tetapi terlepas dari itu, sudah cukup bagus bisa mendongkrak volume transaksi multilateral.

Di pihak lain, terkait dengan SPT perusahaan pedagang penyelenggara SPA, Kepala Bappebti, juga memperingatkan agar segera terkoneksi. "Saya dengar sudah ada yang terkoneksi dengan SPT, tetapi sebagian besar belum, dan kami tunggu sampai kapan lagi mereka siap."

Memang ada beberapa kendala untuk memperoleh izin dari prinsipal penyedia sistem. Tetapi 'kan kebijakan ini sudah hampir satu tahun, jadi tidak ada lagi alasan. Mengapa perusahaan yang lain bisa, tambahnya. Makanya kita beri toleransi, tetapi prinsipnya kebijakan itu tidak mundur.

Baru 3

Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo, menyatakan, SPT dalam penyelenggaraan perdagangan alternatif sudah dioperasionalkan sejak akhir September 2010. Hal itu guna memenuhi peraturan SK Kepala Bappebti No.79/Bappebti/Per/1/2010, yang menetapkan batas waktu mulai dioperasikannya sistem pengawasan tunggal pada 1 Oktober 2010.

Sesuai dengan Surat Kepala Bappebti No.644/Bappebti/12/2009, tentang Pengelolaan Sistem Pengawasan Tunggal dalam Sistem Perdagangan Alternatif, KBI ditunjuk sebagai pengelola sistem pengawasan tunggal tersebut.

"Baru ada dua perusahaan pedagang penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang terkoneksi dengan SPT. Yakni, PT Prolindo Buana Semesta dan PT Royal Assetindo," jelas Surdiyanto, saat dikonfirmasi di sela-sela seminar perusahaan pialang

berjangka di Jakarta, 13 Oktober 2010.

"Prolindo sudah terkoneksi sejak bulan Agustus, sedangkan Royal per September 2010. Dua perusahaan ini kami anggap sebagai pilot projek, dan setelah dievaluasi tidak menemui masalah. Apalagi mereka masing-masing menggunakan sistem yang berbeda. PT Prolindo Buana Semesta dengan sistem meta trader dan PT Royal Assetindo dengan sistem trade pro," jelas Surdiyanto.

Sementara itu, Dirut PT Sentra Arta Maxima, F. Wishnubroto, saat naskah ini disusun, mengaku perusahaannya pun sudah terkoneksi dengan SPT. Dengan demikian baru ada 3 perusahaan penyelenggara SPA yang terkoneksi dengan SPT.

Menurut Surdiyanto, secara prinsip sistem para pedagang itu tidak ada masalah dengan sistem pengawasan tunggal. Karena mayoritas pedagang menggunakan dua sistem itu. Lebih jauh dikatakan Surdiyanto, "saat ini masih dilakukan rollout SPT di 14 perusahaan pedagang penyelenggara SPA. Dan kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah terkoneksi dengan SPT."

"Proses koneksi sistem dari pedagang ini akan diupayakan segera selesai. Sehingga ketika Bappebti mengeluarkan peraturan penyesuaian SK No. 55/2005, terkait dengan laporan transaksi ke bursa, dikeluarkan Bappebti, sistem tersebut sudah tersambung semua," jelas Surdiyanto Suryodarmodjo.

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi volume transaksi BBJ, diketahui transaksi multilateral periode September 2010 meningkat hingga hampir 6 kali lipat, menjadi 2.482 lot dari posisi Agustus sebanyak 440 lot. Demikian juga halnya dengan pelaku pasar, jumlah pialang berjangka bertransaksi kontrak multilateral meningkat menjadi 31%. Peningkatan transaksi itu terdapat sebanyak 20 perusahaan pialang berjangka dan 7 perusahaan pedagang berjangka. ▲

CIMB Niaga & BRI Lirik SRG

Dua bank papan atas nasional mulai melirik pembiayaan SRG. Lembaga terkait juga didorong untuk terjun mendukung suksesnya implementasi SRG, sehingga meningkatkan produktivitas petani dan sektor riil.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bersama pemerintah daerah senantiasa meningkatkan percepatan implementasi pembiayaan komoditi melalui skema Sistem Resi Gudang (SRG). Untuk tahun 2010, melalui dana APBN-P Bappebti membangun sebanyak 12 gudang SRG di 12 kabupaten pada 11 provinsi. Pembangunan gudang itu, menyerap dana sebesar Rp 36 miliar.

Di samping itu, gudang SRG yang telah dibangun pada tahun 2009 sebanyak 35 unit, ditahun 2010 ini dilengkapi dengan sarana mesin pengering- dryer gabah. Nilai pengadaan mesin pengering tersebut menyerap dana dari APBN-P sebesar Rp 25 miliar.

Di sisi lain, dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan gudang serta pemanfaatannya oleh petani dan kelompok tani, Bappebti juga telah melatih tenaga penyuluh pertanian dan tenaga pendamping SRG.

"Realisasi pembangunan gudang SRG yang berasal dari APBN-P 2010 sudah mencapai 80 %, dan diharapkan bisa selesai seluruhnya pada akhir tahun. Harapan kami, pada masa penen gabah diakhir dan awal tahun 2011 gudang tersebut bisa digunakan," jelas Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriono Edi.

Lebih jauh dikatakan Sutriono, selain mendorong pembangunan fisik dan pengelola gudang, Bappebti juga telah melatih calon pengelola gudang, tenaga pendamping SRG, para penyuluh pertanian dan kelompok tani.

Di pihak lain, dijelaskan Sutriono Edi, Bappebti juga mendorong lembaga-lembaga terkait untuk mengimplementasikan SRG di daerah. Seperti, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop UKM.

"Perusahaan negara yang ada di bawah naungan BUMN sebenarnya bisa memanfaatkan SRG guna mendukung sektor riil. Karena perusahaan BUMN punya kewajiban menyisihkan keuntungannya untuk membantu sektor riil seperti petani," tegas Sutriono.

Dana itu 'kan tidak hilang, tambahnya. Karena fisiknya- komoditi ada di gudang sebagai jaminan. Bahkan, bisa mendatangkan keuntungan dari peningkatan harga jual.

Bunga Komersial

"**P**ihak perbankan pun bisa memanfaatkan SRG. Kami sudah menjajaki kerjasama dengan Bank CIMB Niaga untuk pembiayaan resi gudang

dengan komoditas lada di Lampung. Dan dalam waktu dekat ini, Bank CIMB Niaga akan mengalurkan pembiayaan SRG. Jumlah dana yang akan disalurkan cukup besar, mencapai 2 juta dolar Amerika," kata Sutriono.

Yang menarik, katanya lebih jauh, pola yang digunakan untuk pembiayaan resi gudang itu menggunakan bunga komersial. Jadi tidak mendapatkan subsidi bunga seperti petani kecil.

Selain CIMB Niaga, pola yang sama juga akan dilakukan dengan Bank Rakyat Indonesia- BRI. Untuk itu pun, Bappebti telah melakukan kerjasama dengan BRI. Skema SRG ini diperuntukan pada komoditi kopi tujuan ekspor dari Aceh dan Medan, Sumut.

Di samping itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga mulai menjajaki pembiayaan ekspor komoditi rumput laut dan kakao dari Wilayah Timur Indonesia.

"Ini yang kita harapkan, semakin banyak perbankan nasional yang mau menyalurkan pembiayaan SRG. Kelemahannya selama ini, perbankan kurang percaya dengan skema SRG. Memang kita maklumi, karena ini masih dianggap barang baru. Dan mereka pun belum punya kemampuan untuk menganalisa pembiayaan dengan jaminan komoditi," ungkap Sutriono Edi. ▲

Pembiayaan SRG Makin Meningkatkan

Hingga bulan Oktober 2010, pembiayaan melalui skema sistem resi gudang (SRG) kepada petani dan kelompok tani semakin meningkat. Pembiayaan yang diserap petani per 12 Oktober 2010, sudah mencapai lebih dari Rp 2,551 miliar. Peningkatan itu mencapai 1.765 % dibandingkan tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2009, total pembiayaan hanya mencapai Rp 136,8 juta.

Pembiayaan yang disalurkan selama tahun 2010 itu, diperoleh dari penerbitan resi gudang sebanyak 27 resi. Dengan nilai komoditi lebih dari Rp 5.178 miliar. Atau setara dengan 1.433,86 ton komoditi.

"Untuk bulan Oktober 2010, sudah diterbitkan sebanyak 5 resi gudang untuk komoditas gabah. Dengan jumlah 417,55 ton atau senilai Rp1,45 miliar. Jadi, selama periode Januari - Oktober 2010, total resi gudang yang telah diterbitkan sebanyak 27 resi. Seluruhnya merupakan komoditas gabah, sebanyak 1.433,86 ton," demikian antara lain diutarakan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutrisno Edi, terkait dengan perkembangan SRG.

Sementara itu, menurut Sutrisno Edi, perbankan dan non-bank yang menyalurkan pembiayaan resi gudang jumlahnya juga semakin meningkat. Tercatat ada enam lembaga pembiayaan yang telah menyalurkan pinjaman

hingga oktober 2010. Dari pembiayaan itu, ada petani dan kelompok tani yang mendapatkan subsidi bunga bank sesuai dengan kebijakan pemerintah.

"Nilai pembiayaan yang disalurkan dari enam lembaga itu, lebih dari Rp 3 miliar. Yang mendapatkan subsidi bunga bank nilainya mencapai Rp 721 juta. Sedangkan non-subsidi, lebih dari Rp 2,280 miliar," jelas Sutrisno.

Enam lembaga keuangan bank dan non-bank yang menyalurkan pembi-

ayaan tersebut, masing-masing, BPD Jabar Banten, BPD Jatim, BRI, BPRS Bina Amanah Satria, Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Kliring Berjangka Indonesia (persero), dan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMK.

Menguntungkan

Lebih jauh dijelaskan Sutrisno Edi, pembiayaan resi gudang telah terbukti memberi manfaat besar kepada kalangan petani dan kelompok tani. Seperti Kelompok Tani, Wardo Tani, di Kabupaten Banyuwangi, Jatim, memperoleh keuntungan sekitar Rp 287,38 per kilogram dari komoditi gabah yang diresigudangkan.

Demikian juga dengan Kelompok Tani Jaya Tani, di Indramayu, Jabar. Memperoleh keuntungan sebesar Rp 615 per kg dari komoditi gabah yang kemudian dijual. Keuntungan tersebut diperoleh setelah nilai penjualan komoditi dikurangi biaya pengelolaan gudang Rp 50 per kg dan beban bunga serta pembebanan hak jaminan Rp 12 per kg.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari pusat registrasi, hingga 14 Oktober 2010 masih terdapat sebanyak 19 resi gudang aktif. Dengan nilai komoditi gabah sekitar Rp 4,1 miliar atau setara dengan 1.090 ton gabah.

Masing-masing resi gudang aktif tersebut, terdiri dari 8 resi gudang diterbitkan PT Pertani, Indramayu, Jabar, 9 resi gudang dari PT Pertani, Banyuwangi, Jatim. Serta, 2 resi gudang yang diterbitkan PT Pertani Sidrap, Sulsel. ▲

Rekapitulasi Resi Gudang

Tahun	Resi Gudang	Nilai Komoditi (Rp)	Pembiayaan Bank/Non-Bank (Rp)
2008	16	1.431.616.200	313.900.000
2009	13	552.962.240	136.800.000
2010*)	27	5.178.131.500	2.551.162.250
Total	56	7.162.709.940	3.001.862.250

*) 12 Oktober 2010,

Rekapitulasi Pembiayaan Bank/Non-Bank

Lembaga Pembiayaan	Subsidi 6 %	Non Subsidi	
BPD Jabar Banten	280.000.000	-	
BRI	-	296.800.000	
BPRS Bina Amanah Satria	-	130.000.000	
BPD Jatim	441.000.000	-	
PKBL KBI	-	1.543.512.250	
LPDB KUKM	-	286.650.000	
Jumlah	721.000.000	2.280.862.250	
Total			3.001.862.250

Sumber: Biro Pasar Fisik & Jasa Bappebti



Master Plan Gudang Pangan

Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu didampingi Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, memimpin pertemuan pembahasan pinalisasi master plan pengembangan gudang pangan, pada 1 Oktober 2010, di Gedung Kementerian Perdagangan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Deddy Saleh dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Subagyo.

Di samping itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan dan wakil yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kement-

terian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan BAPPENAS. Serta para stakeholder lainnya, seperti BUILOG, PT. Bhandha Gara Reksa, PT. Pertanian, PT. Sang Hyang Seri, dan KADIN.

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk melaksanakan Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi melalui pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitas efektifitas pemanfaatannya.

Salah satu keluaran dari program ini adalah disusunnya Master Plan Pengembangan Gudang Pangan

sebagai upaya mendukung program prioritas nasional tentang Ketahanan Pangan.

Tim yang ditunjuk dalam penyusunan master plan tersebut diantaranya berasal dari kalangan akademis Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan lembaga peneliti INDEF.

Dalam presentasinya, konsep master plan tersebut, antara lain, pemetaan pangan strategis dan pergudangan nasional, Road Map Pengembangan Gudang Pangan untuk lima tahun mendatang.

Dan, rencana pengembangan gudang baru untuk mendukung ketahanan pangan yang diprioritaskan pada daerah yang tidak memiliki gudang dengan kapasitas yang memadai.▲



Belum Saat Tepat Bappebti Masuk OJK

Kepala Bappebti Deddy Saleh, menilai, Bappebti belum saatnya masuk dilebur pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, Bappebti masih dalam tahap pembenahan sebagai lembaga pengawas. Di pihak lain, dikalangan masyarakat dan legislatif masih tercium aroma pro-kontra OJK.

“Bappebti belum saatnya untuk bergabung dengan OJK. Karena dua pertimbangan tadi,” demikian antara lain dikatakan Deddy Saleh, atas undangan Komisi XI DPR RI, terkait pembahasan OJK.

Semula tahun 2002, ketika wacana pembentukan OJK diembuskan, Bappebti termasuk salah satu tim yang

diunjuk. Namun, dalam beberapa kali pertemuan lanjutan Bappebti tidak dilibatkan lagi.

Menurut Deddy, ketika dikonfirmasi saat acara Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka di Surabaya, baru-baru ini, mengatakan, biarlah OJK terbentuk tanpa Bappebti. Kemudian setelah OJK berjalan barulah Bappebti bisa digabungkan.

“Di Bappebti masih banyak yang harus dibenahi. Sedangkan Bapepam-LK dan Bank Indonesia relatif sudah berjalan sebagai lembaga pengawasan,” tegasnya.

“Kami sudah menyampaikan beberapa alasan kepada DPR, mengapa Bappebti tidak perlu masuk

OJK. Tetapi, apa pun hasilnya nanti tergantung keputusan politik DPR,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan Deddy Saleh, prinsip dibentuknya OJK sebagai lembaga pengawas itu baik. Tetapi bukan satu-satunya solusi. Dibanyak negara tidak ada OJK, dan tidak ada pula masalah.

“Di Inggris, ada lembaga sejenis OJK. Tetapi kemudian menjadi bermasalah. Lain lagi di Australia, OJK di sana berjalan dengan baik,” jelasnya.

“Tetapi intinya, lebih baik Bappebti tidak dulu masuk dalam OJK. Karena masih banyak yang harus dibenahi untuk kepentingan yang lebih mendasar,” papar Deddy Saleh. ▲

Izin Pandu di Cabut, Mega ‘Berkibar’

Bappebti mencabut izin usaha pialang berjangka atas nama PT Pandu Dana Utama Berjangka. Pencabutan izin usaha itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1119/Bappebti/SA/09/2010.

Sebelumnya, izin perusahaan ini sudah dibekukan pada 12 Februari 2010. Dengan SK Kepala Bappebti No. 970/Bappebti/SA/02/2010. Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajiban dan perbaikan, akhirnya Bappebti mencabut izin usaha.

“Sekitar bulan Februari 2010, lalu, manajemen PT Pandu dengan inisiatif sendiri meminta pada Bappebti untuk dibekukan izinnya. Supaya mereka bisa membenahi adminstratif dan permodalannya. Oleh karena itu,

Bappebti memberi tenggang waktu untuk dilakukan pembenahan,” kata Alfons.

“Tetapi kenyataannya, mereka tidak melakukan langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan. Di samping itu, keanggotaannya pun di BBJ sudah dicabut. Makanya Bappebti mencabut izin usaha pialang itu,” jelas Alfons.

Megagrowth
Sementara itu, setelah melakukan perbaikan PT Megagrowth Futures kembali diperbolehkan Bappebti beroperasi sebagaimana mestinya. Semula, izin usaha perusahaan ini dibekukan Bappebti berdasarkan SK Kepala Bappebti No. 1010/BAPPEBTI/SA/09/2010. Dengan perbaikan itu, Kepala Bappebti pun menerbitkan Surat Keputusan No.

1118/BAPPEBTI/SA/09/2010, tertanggal 21 September 2010, tentang diizinkan kembali PT Megagrowth Futures, beroperasi.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, pembekuan izin usaha PT Megagrowth Futures karena tidak aktif melakukan kegiatan pialang berjangka pada alamat yang terdapat di Bappebti. Selain itu, tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan, dan tidak menyampaikan laporan keuangan secara regular seperti yang dipersyaratkan peraturan.

“Namun, setelah mereka melakukan perbaikan dan mematuhi ketentuan izinnya dikembalikan dan mereka sudah bisa beroperasi seperti biasa,” jelas Alfons Samosir. ▲

ISI Serah Fisik Emas

PT Identrust Security International (ISI) untuk pertama kalinya lakukan serah fisik emas dari hasil transaksi di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Serah fisik emas itu diselenggarakan di Unit Bisnis Pemurnian dan Pengolahan (UBPP) Logam Mulia, PT Aneka Tambang Tbk., pada 14 Oktober 2010, di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Sebagaimana diketahui, BKDI melakukan perdagangan perdana

kontrak berjangka emas pada 31 Maret 2010.

Serah fisik emas berkadar 99,99 persen itu, terjadi antara trader ritel emas selaku penjual dan pembeli ritel yang berasal dari Yogyakarta. Sedangkan jumlah emas yang diserahkan sebanyak 100 gram atau setara 1 lot kontrak berjangka emas BKDI.

Menurut Dirut BKDI, Megain Wijaya, transaksi ini merupakan transaksi ritel, jumlah emas yang

diserahkan tidak banyak, hanya 1 lot saja. Setara 100 gram emas.

Meski demikian, tambah Megain, peristiwa serah fisik ini menandakan bahwa BKDI bisa dipercaya sebagai sarana transaksi emas.

“Keberhasilan serah fisik emas itu akan mencerminkan keberhasilan bursa berjangka di Indonesia. Sekaligus, mendorong perkembangan BKDI menjadi bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka emas berskala internasional,” jelas Megain. ▲

Demutualisasi Peluang Merger Dengan Bursa Asing

Salah satu isu penting amandemen Undang-undang No 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, adalah demutualisasi bursa. Artinya, dengan demutualisasi bursa bisa dimiliki oleh siapa pun. Baik melalui penawaran dibursa saham maupun dimiliki perorangan atau kelompok.

Tujuannya, dengan kepemilikan saham suatu bursa berjangka, akan mendorong tingkat kepedulian terhadap bursa serta mampu meningkatkan volume transaksi.

"Hampir seluruh bursa berjangka di dunia sudah mengalami demutualisasi. Oleh karenanya, itu pun akan dilakukan di bursa berjangka

kita," kata Kepala Bappebti, Deddy Saleh.

Selama ini pemikirannya, tambah Deddy, bursa hanya sebagai fasilitator, tidak berorientasi profit. "Nah, sekarang pemikirannya sudah berkembang. Kalau bursa ingin maju, harus berorientasi profit. "Di era global seperti ini, bursa tak 'kan bisa hidup dan mengembangkan produknya, kalau hanya berharap dari komisi transaksi."

"Hal yang lebih jauh lagi, dengan demutualisasi itu bursa lokal berpeluang merger atau sahamnya dimiliki bursa asing. Dan itu sudah menjadi tren dunia. Seperti baru-baru ini kita ketahui, Singapore Stock Exchange akan membeli Australia Stock Exchange," jelas Deddy Saleh.

"Memang terjadi perdebatan sengit di masyarakat dan parlemen Australia, tetapi tujuan bursa akan tercapai yakni terciptanya price reference. Dan di sisi lain, sektor ekonomi akan lebih maju," tambahnya.

"Tentunya bursa berjangka di Indonesia memiliki potensi ke arah itu. Mengingat populasi penduduk Indonesia yang terus berkembang dan kekayaan alamnya yang berlimpah. Jadi, tinggal bagaimana bursa berjangka yang ada bisa berbenah diri dan menunjukkan kredibilitasnya," ujar Deddy.

Menurut Deddy Saleh, kalau pun kesempatan itu datang, kepemilikan saham bursa asing harus dibatasi. Paling tidak sahamnya bisa dilepas 40 - 45 %, sehingga bursa lokal masih mayoritas menguasainya. ▲

BAKTI Ambil Keputusan Perdana

Setelah sekitar enam bulan melakukan pemeriksaan dokumen transaksi perdagangan berjangka dan menggelar persidangan, akhirnya pada 27 Agustus 2010 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) untuk pertama kalinya mengeluarkan putusan. Putusan BAKTI itu atas perkara yang diajukan seorang pribadi investor selaku penggugat dan sebuah perusahaan pialang berjangka selaku tergugat.

Dalam putusan perkara tersebut, Majelis Arbitrase yang terdiri dari tiga tokoh, menimbang bahwa baik investor maupun perusahaan pialang berjangka memiliki andil atas kerugian yang diderita oleh investor. Sehingga,

sudah sepantasnya kerugian tersebut menjadi beban dan tanggungjawab kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Arbitrase mengabulkan sebagian tuntutan investor dan menghukum perusahaan pialang berjangka untuk membayar ganti rugi sebesar 50 % dari nilai yang dituntut investor.

Menurut Wakil Ketua BAKTI, Achmad Djauhari, masing-masing pihak yang bersengketa menerima keputusan Majelis Arbitrase. "Dan, hasil keputusan majelis itu sudah dijalankan mereka."

"Saya cukup salut dengan sikap dan langkah yang ditempuh investor itu. Mengingat lembaga ini masih baru

tetapi dia yakin dan percaya kasusnya bisa diselesaikan lewat BAKTI," ujar Achmad Djauhari.

"BAPMI- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sejak berdiri tahun 2002, belum pernah mengeluarkan keputusan. Padahal BAKTI baru berdiri tahun 2008. Tetapi saya dengar, setelah BAKTI mengeluarkan keputusan, BAPMI juga berhasil melahirkan keputusan atas sengketa di pasar modal," jelas Djauhari.

Dengan berhasilnya BAKTI mengeluarkan putusan perkara pertama itu, diharapkan kepercayaan para pelaku pasar untuk membawa persengketaan mereka ke BAKTI. Dengan demikian akan meningkatkan kredibilitas perdagangan berjangka komoditi di tengah masyarakat. ▲

▶ AGENDA ◀



Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu didampingi Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, Kepala Bappebti, Deddy Saleh dan Dirjen PDN, Subagyo memimpin Pertemuan Pembahasan Finalisasi Master Plan Pengembangan Gudang Pangan. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk melaksanakan Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi melalui pembangunan gudang-gudang pangan dan penyediaan peralatannya serta fasilitas efektifitas pemanfaatannya. Salah satu keluaran dari program ini adalah Masterplan Pengembangan Gudang Pangan sebagai upaya mendukung program prioritas nasional tentang Ketahanan Pangan. Pertemuan Pembahasan Finalisasi Master Plan Pengembangan Gudang Pangan ini, dihadiri oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan dan wakil yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN, BAPPENAS serta para stakeholder lainnya seperti BULOG, PT. BGR, PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, dan KADIN. Tim penyusun Master Plan yang berasal dari Universitas Indonesia, IPB dan INDEF mempresentasikan konsep Masterplan tersebut, antara lain: pemetaan pangan strategis dan pergudangan nasional, Road Map Pengembangan Gudang Pangan untuk 5 tahun mendatang, dan rencana pengembangan gudang baru untuk mendukung ketahanan pangan yang diprioritaskan pada daerah yang tidak memiliki gudang dengan kapasitas yang memadai. Jum'at 1 Oktober 2010



Kepala Bappebti, diwakili Kepala Biro Pasar Fisik & Jasa, Sutriyono Edi, membuka Konsinyering Penyusunan RKAKL Dana Dekonsentrasi Tahun 2011 di Jakarta. Dalam konsinyering tersebut materi yang dibahas antara lain perumusan dan penyusunan format RKAKL agar pelaksanaan PL dapat berjalan sesuai pedoman kebijakan anggaran yang berbasis kepada kinerja. Peserta Konsinyering meliputi pejabat Bappebti dan kepala bidang yang menangani Pasar Lelang di 19 Dinas Provinsi seluruh Indonesia. 28 – 29 September 2010





Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perindag dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang, di Hotel Pantai Cermin Serdang Bedagai Sumatera Utara. Kepala Bappebti, Deddy Saleh dalam sambutannya menyampaikan pentingnya infrastruktur gudang komoditi primer bagi petani atau kelompok tani, agar mereka dapat menyimpan hasil panen di gudang untuk diterbitkan resi gudang sebagai tunda jual menunggu harga membaik. Acara tersebut dibuka oleh Bupati Serdang Bedagai, H.T. Erry Nuradi, ditandai dengan pemukulan gong dan disaksikan oleh Kepala Bappebti, Deddy Saleh serta Sekretaris Bappebti, Nizarli. 06 Oktober 2010



Kepala Bappebti, Deddy Saleh, memberi arahan sekaligus menutup penyelenggaraan acara Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka di Surabaya kepada sebanyak 175 Wakil Pialang Berjangka dari 40 perusahaan pialang berjangka bertempat di Hotel Sheraton, Surabaya, Jatim. Dalam pengarahannya, dikatakan Wakil Pialang Berjangka yang profesional turut mendukung pencitraan industri perdagangan berjangka Indonesia yang lebih baik sesuai undang-undang. Sebelum Wakil Pialang Berjangka mendapatkan paparan lengkap tentang teori perdagangan berjangka komoditi, dimulai dengan uji kemampuan dengan test tertulis. Selanjutnya pengetahuan teknis dan teori perdagangan berjangka komoditi diberikan para narasumber. 18 Oktober 2010



Amandemen Undang-Undang Menyentuh Rakyat Petani

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengagendakan amandemen Undang-undang No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Undang-undang No. 09/2006, tentang Sistem Resi Gudang. Inisiasi amandemen dua undang-undang yang berada dibawah payung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) itu, datangnya dari sejumlah Anggota Komisi VI DPR-RI. Sebab, dua undang-undang tersebut dianggap penting untuk menggerakkan sektor riil, dan yang menyentuh kehidupan rakyat petani. Selain itu, amandemen ini akan memperkuat struktur perekonomian nasional, baik di dalam negeri maupun ditataran internasional. Sedangkan posisi Kementerian Perdagangan- Bappebti, hanya sebagai salah satu nara-

sumber yang memperkaya substansi amandemen.

Terkait dengan isu amandemen dua undang-undang tersebut, Redaksi secara khusus mewawancarai Kepala Biro Hukum, Bappebti, Alfons Samosir. Berikut ini petikannya.

(Tanya). Apa yang melatarbelakangi DPR-RI khususnya Komisi VI, untuk mengamandemen Undang-undang No. 32/1997?

(Jawab). Dari sudut pandang Bappebti, jelas Undang-undang No. 32/1997, itu, sudah sangat out of date. Perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi dunia sudah jauh lebih maju, dan undang-undang yang ada tidak akan mungkin menciptakan persaingan antara bursa lokal dengan bursa asing.

Jadi kita sangat beruntung memiliki Anggota DPR khususnya dari Komisi VI, yang berfikir visioner. Mereka melihat perkembangan jaman jauh kedepan. Misalnya, dari usulan amandemen UU No. 32/1997, dimasukkan transaksi kontrak berjangka yang intangible-tak berwujud. Misalnya, kontrak berjangka jasa, suku bunga dan iklim.

Bahkan, Indonesia berpeluang memperdagangkan kontrak berjangka emisi karbon. Karena seluruh dunia tahu, Indonesia merupakan salah satu negara paru-paru dunia dengan hutannya yang demikian luas.

Sedangkan undang-undang yang ada hanya mengakomodasi kontrak komoditi yang tangible- berwujud. Seperti, komoditi kopi, kakao, batubara, logam dan lainnya.

Sehingga, undang-undang itu perlu dilakukan perubahan. Pemerintah atau Bappebti dan bursa, tidak

punya mandate untuk memperluas kontrak berjangka industri ini bila tidak dilandasi undang-undang.

(T). Sedangkan untuk Undang-undang No.9/2006, apa yang melatarbelakangi-nya?

(J). Salah satu kunci sukses pembiayaan SRG adalah aktifnya perbankan menyalurkan pembiayaan komoditi. Dan hingga saat ini, perbankan nasional masih memiliki keraguan untuk menyalurkan pembiayaan karena belum adanya indemnity fund-lembaga penjaminan gagal bayar. Lembaga ini sangat penting, di samping meningkatkan integritas bisa juga meningkatkan kredibilitas. Dan bila perbankan memiliki kepercayaan, maka pinjaman akan mengalir kepada petani.

Jadi, sementara ini, isu pokok yang ditangkap Anggota Komisi VI DPR, itu, untuk amandemen undang-undang SRG hanya satu itu. Yakni, perlunya lembaga penjaminan.

(T). Secara umum, isu pokok amandemen UU No.32/1997 apa saja?

(J). Berdasarkan pertemuan informal dengan beberapa Anggota Komisi VI, setidaknya ada lima isu pokok. Pertama, diberikannya peluang kepada pelaku pasar untuk mengembangkan kontrak berjangka. Seperti diketahui, saat ini ketentuan memperdagangkan kontrak berjangka harus diputuskan melalui Keputusan Presiden. Dengan amandemen tersebut, suatu kontrak berjangka cukup ditentukan oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti. Hal ini juga mengantisipasi perkembangan bursa yang sangat cepat.

Kedua, terkait dengan UU No.11/2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini sifatnya hanya penyesuaian. Karena industri

perdagangan berjangka seluruhnya ditransaksikan melalui teknologi informasi.

Ketiga, perlunya asosiasi tunggal industri perdagangan berjangka yang independen. Untuk itu perlu diatur berdasarkan undang-undang. Karena keberadaan asosiasi itu nantinya akan menjadi mitra Bappebti dalam mengembangkan industri ini.

Dari berbagai kunjungan kami di bursa berjangka luar negeri, saya dapat menangkap, majunya suatu bursa bukan karena sudah lama berdiri. Melainkan peran asosiasi yang terus menerus mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan apa manfaatnya bursa itu. Kalau itu memang bisa dilakukan di Indonesia, betapa hebatnya Indonesia. Seluruh dunia menentukan berbagai kebijakan berdasarkan price reference yang terdapat di Indonesia. Sesungguhnya hal itu tidak mustahil, sebab kita produsen utama berbagai macam komoditi dunia.

Keempat, terkait dengan perlindungan masyarakat dalam transaksi perdagangan berjangka di luar bursa- seperti SPA. Perdagangan ini perlu diatur secara ketat.

Kelima, tentang demutualisasi bursa berjangka. Saat ini, berdasarkan undang-undang bursa berjangka bersifat keanggotaan dan tidak berorientasi profit. Ini mengakibatkan tidak menarik bagi pemiliknya sendiri untuk bertransaksi dan mengembangkannya. Sedangkan di bursa asing, sudah hampir 80 % bursa berjangka demutualisasi. Jadi siapa saja bisa menjadi pemilik bursa. Ini akan membuat bursa menjadi dinamis.

(T). Untuk memperkaya substansi, apakah Anggota DPR perlu studi banding?

(J). DPR sudah memberitahu pada Sekjen Kementerian Perda-

ngan, dikatakan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke beberapa negara. Terutama ke Inggris, Hongkong, dan Hongaria. Di Inggris mereka akan mengunjungi bursa London Metal Exchange. Dan lembaga iklim di Inggris, untuk berdiskusi tentang transaksi kontrak emisi karbon.

Di Hongaria, mereka akan mempelajari praktik resi gudang di sana dan bagaimana keberadaan lembaga indemnity fund dalam meningkatkan implementasi SRG. Sedangkan ke Hongkong, mereka juga akan mengunjungi dan mempelajari bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak di luar bursa.

(T). Setelah amandemen selesai, apakah akan ada juga perubahan peraturan di bawah undang-undang?

(J). Jelas ada. Dibenak saya saat ini, ketika UU ini diserahkan kepada pemerintah, hari pertama kerja sudah langsung membahas revisi peraturan di bahwa undang-undang. Semua peraturan di bawah UU akan direvisi. Mulai dari PP No. 9/1999, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, PP No. 10/1999, tentang tata cara pemeriksaan di bidang perdagangan berjangka, Kepres No.12/1999, tentang komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka.

Kurang lebih, 50 peraturan Bappebti dari 65 yang sudah dikeluarkan akan direvisi semua. Ini konsekuensi logis, karena peraturan di bawah undang-undang lebih bersifat teknis, ini pekerjaan yang sangat berat dan memakan waktu lama. Paling tidak untuk ini dibutuhkan waktu sekitar enam bulan. Karena peraturan ini ini harus operasional.

Tetapi saya percaya dan yakin, Kepala Bappebti, Deddy Saleh, yang juga visioner dan didukung staf yang handal, revisi ini akan berjalan cepat dan tepat waktu. ▲

iPasar Resmi Penyelenggara Lelang Forward

Setelah dua tahun berjalan menyelenggarakan pasar lelang komoditi secara forward- penyerahan kemudian, akhirnya PT. iPasar Indonesia memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Demikian halnya dengan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) selaku lembaga penjaminan.

Persetujuan Bappebti yang diberikan kepada iPasar dilandasi SK Kepala Bappebti No.13/Bappebti/PER-PL/10/2010 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (forward). Sedangkan untuk lembaga penjaminan, diberikan kepada PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 14/Bappebti/PER-PL/10/2010, tentang persetujuan sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang (LKP2L) Dengan Penyerahan Kemudian (forward).

Dua surat persetujuan itu dikeluarkan Kepala Bappebti, Deddy Saleh, pada 15 Oktober 2010. Dan, diserahkan pada masing-masing pihak pada 22 Oktober 2010, di Bappebti.

"Untuk menyelenggarakan pasar lelang forward setiap pihak harus mendapat persetujuan dari Bappebti. Karena Bappebti akan membina dan mengawasi berjalannya pasar lelang secara benar dan transparan," tegas Deddy Saleh.

Kewenangan itu ada ditangan Bappebti berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004, tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian-forward Komoditi Agro.

"Hingga kini kebijakan itu masih berlaku, dan kewenangannya ada di Bappebti," kata Deddy Saleh.

Persetujuan yang diberikan kepada

iPasar itu, tambah Deddy Saleh, juga untuk menyelenggarakan pasar lelang komoditi secara spot.

Hal senada juga dikatakan Komisaris iPasar, Alexander Gee, izin persetujuan yang dikeluarkan Bappebti itu tidak disertai adanya persyaratan khusus. Namun, iPasar harus membuat kode etik selayaknya sebagai penyelenggara yang mengoperasikan sebuah pasar yang transparan.

"Hal itu jelas tertuang pada pasal 1 SK Bappebti, dimana disebutkan sebagai penyelenggara pasar lelang forward, iPasar berkewajiban melaporkan kegiatan pasar lelang dengan penyerahan segera (spot/tunai) kepada Bappebti," jelas Gee.



Kerjasama

Sementara itu, PT iPasar Indonesia dalam mengembangkan bisnisnya melakukan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerjasama itu untuk pemasaran hasil kelautan, khususnya rumput laut. Dari sisi KKP, akan disiapkan infrastruktur seperti gudang penyimpanan, edukasi terhadap nelayan dan sarana-sarana lainnya.

Pokok-pokok kerjasama dua pihak ini ditandatangani Komisaris Utama iPasar, Adi Sasono, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Fadel Muhammad, dan disaksikan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, 27 September 2010, di

gedung BNI, Jakarta.

Sisi lain, ditempat yang sama iPasar juga melakukan kerjasama dengan KBI dan BNI 46. Inti kerjasama tiga pihak ini iPasar selaku penyelenggara pasar lelang forward secara online, KBI sebagai pihak penjamin dan penyelesaian transaksi sedangkan BNI 46 bertindak sebagai bank penyimpanan dana penjaminan dan lalu lintas transaksi pasar lelang.

"Kami bekerja sama dengan iPasar, karena sebelumnya kami punya pengalaman untuk bekerja sama soal jagung. Kerja sama dengan iPasar itu mampu meningkatkan produksi jagung secara signifikan. Dan itu pun kami harapkan akan terjadi pada kerjasama di bidang perikanan dan kelautan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad.

Senada dengan itu, Komisaris Utama iPasar, Adi Sasono, menyatakan, KKP bersama dengan iPasar dan KBI, mencoba membuat suatu terobosan dengan menciptakan mekanisme transaksi hasil kelautan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Penggunaan teknologi ini sangat efisien dan efektif, misalnya, saat barang masih ada di pantai kita sudah bertransaksi dengan pembeli di kota.

Dengan demikian, lanjut Adi, iPasar akan menutuskan mata rantai yang panjang dari transaksi komoditi.

"Dan yang terpenting lagi, informasi harga-harga komoditi bisa diakses melalui iPasar secara real time," jelas Adi Sasono.

Mengapa informasi harga itu penting, tambah Adi, jika harga komoditi kurang baik kita tidak perlu buru-buru menjualnya. Tetapi bisa disimpan di gudang. Dengan penyimpanan itu, akan diperoleh resi gudang.

"Dengan memiliki dokumen resi gudang, kita pun sudah sbisa menjaminkannya ke bank untuk memperoleh pinjaman," tandas Adi Sasono. ▲

PLKA Jakarta Miliki Agro Outlet

Provinsi DKI Jakarta sebagai pasar terbesar dari komoditi kebutuhan pokok kini telah memiliki jalur distribusi yang cukup lengkap. Jalur distribusi itu tidak saja untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jakarta, tetapi juga sebagai poin tersebarannya komoditi baik untuk pasar lokal maupun untuk tujuan ekspor.

Berkaitan dengan itu, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, Provinsi DKI Jakarta, telah mendirikan Agro Outlet di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur. Jalur distribusi komoditi ini secara resmi dioperasikan pada 20 Oktober 2010. Tujuan didirikan sarana ini sebagai wadah transaksi langsung para pembeli dan penjual komoditi dari berbagai daerah.

Di samping itu, Agro Outlet Pasar Induk Kramatjati, juga untuk memperkuat sarana distribusi yang sudah ada yakni pasar lelang komoditi agro (PLKA).

Peresmian berdirinya Agro Outlet Pasar Induk Kramatjati, dibuka oleh Plh. Walikota Jakarta Timur, Asep Syarifudin. Hadir dalam acara itu antara lain, pejabat Kementerian Perdagangan

an, jajaran pejabat Pemda DKI Jakarta, perwakilan DPRD Kalimantan Selatan, dan pedagang Pasar Induk Kramatjati serta pedagang komoditi antar daerah.

Setelah dilakukan peresmian Agro Outlet Pasar Induk Kramatjati, disusul dengan penyelenggaraan PLKA Jakarta. Dan kesempatan pelaksanaan PLKA Jakarta itu pun dibuka langsung oleh Plh. Walikota Jakarta Timur, Asep Syarifudin.

Dalam sambutannya, Asep Syarifudin, mengatakan, keberadaan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro merupakan upaya untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Provinsi DKI Jakarta dengan kualitas yang baik.

"Selain itu, kegiatan ini sangat menguntungkan para petani karena dapat melakukan penawaran langsung dengan pedagang, sehingga petani akan mendapatkan harga yang menguntungkan."

Pelaksanaan lelang kali ini dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari berbagai daerah, antara lain Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara

Barat, dan Kalimantan Selatan.

Nilai transaksi yang berhasil dibukukan pada pelaksanaan lelang kali ini mencapai Rp 13,87 miliar. Sedangkan komoditi yang mendominasi nilai transaksi adalah komoditi beras, kentang, dan buah mangga.

Sosialisasi

Guna mengembangkan PLKA di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pasar Lelang. Kegiatan itu dilaksanakan di Ruang Serba Guna UPB Pasar Induk Kramat Jati, 14 Oktober 2010.

Kegiatan ini dibuka Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Suryantika Sinaga. Para Pembicara antara lain pejabat Bappebti, Kementerian Perdagangan, Dharmayugo Hermansyah dan Chepi Sumintadiredja. Susi dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Pengurus Koperasi Pasar Induk Kramat Jati, Margono.

Peserta yang hadir pada sosialisasi tersebut berjumlah 75 orang, yang berasal dari para pelaku usaha Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang. ▲



China tingkatkan pembelian, harga karet melonjak

Perdagangan komoditi karet di bursa Tokyo Commodity Exchange, tampak menarik dalam perdagangan minggu ketiga Oktober 2010. Bahkan, pergerakan harga karet mampu tarik-menarik dengan harga minyak bumi. Pergerakan harga karet itu disinyalir aksi spekulasi China yang akan meningkatkan pembelian karetnya.

Harga kontrak yang paling aktif diperdagangkan di Tokyo Commodity Exchange ini naik sebesar 0,5 % menjadi 335,3 yen per kilogram (US\$ 4.135 per metrik ton) sebelum akhirnya diperdagangkan di level 334,6 yen.

“China kemungkinan akan meningkatkan pembeliannya dan mengambil keuntungan dari anjloknya pasar fisik karet sekaligus untuk meningkatkan persediaan karet mereka,” kata Kazuhiko Saito, Analis Fujitomi Co.

Harga karet untuk pengiriman Mei 2011 di Shanghai Futures Exchange juga naik 32.570 yuan (US\$ 4.893) per ton sebelum diperdagangkan di level 32.430 yuan pada pukul 10:15 waktu setempat. Kontrak yang paling aktif diperdagangkan ini semoar menembus rekor 33.000 yuan pada 19 Oktober 2010.

Pengiriman dari Thailand, negara eksportir karet terbesar di dunia, telah berkurang untuk jenis karet RSS-3 grade untuk pengiriman November menjadi US\$ 3,94 per kilogram dari US\$ 4 minggu lalu.

Persediaan karet alam bertambah sekitar 3.880 tons menjadi 41.681 ton, level yang paling tinggi dalam enam bulan terakhir ini. Hal ini ditegaskan oleh Shanghai Futures Exchange pada akhir pekan lalu berdasarkan surveinya terhadap 10 gudang karet di Shanghai, Shandong, Yunan, Hainan dan Tianjin ▲

Produksi Indonesia naik, harga kopi global anjlok

Harga kopi robusta anjlok cukup besar dalam tiga minggu terakhir ini di tengah spekulasi adanya panen yang cukup besar di Indonesia, negara penghasil kopi terbesar kedua di Asia. Sementara itu, harga kopi arabika juga anjlok dari level tertingginya dalam 13 tahun ini.

Produksi kopi robusta Indonesia kemungkinan akan meningkat menjadi 12 juta karung (1 karung setara dengan 60 kg) dalam dua hingga tiga tahun. Hal ini ditegaskan

oleh Denis Seudieu, Chief Economist International Coffee Organization.

“Bagi Indonesia, ini adalah perkembangan yang positif,” kata Seudieu. Menurut hitungannya, ada kemungkinan Indonesia akan memproduksi sekitar 10 juta ton; atau meningkat sebesar 2%-3% dari tahun lalu.

Harga kopi robusta untuk pengiriman Januari di bursa NYSE, anjlok sebesar US\$ 12, atau 0,6 % menjadi US\$ 1.881 per metrik ton. Harga kopi ini telah anjlok 2,8

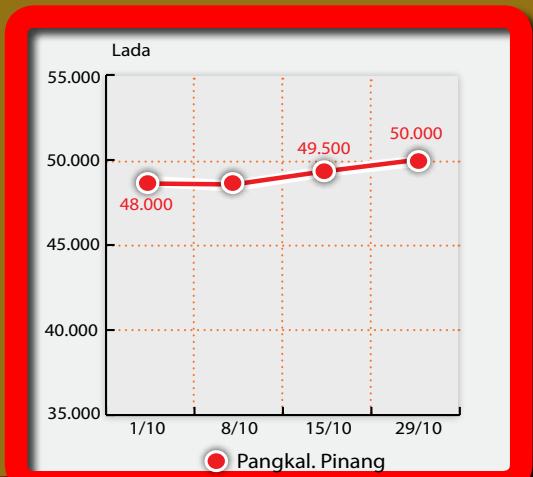
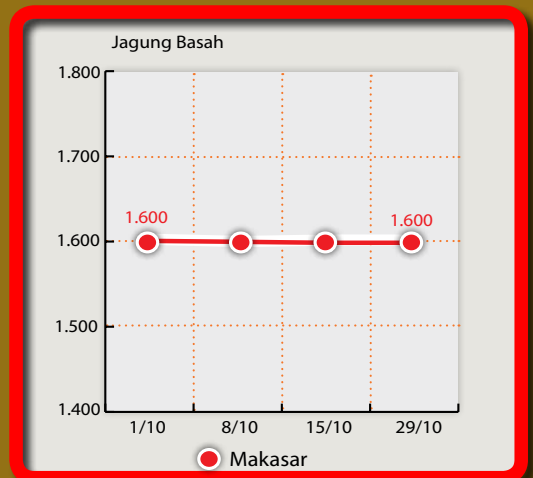
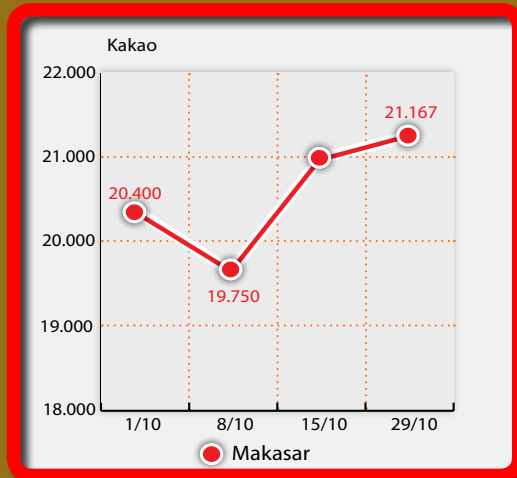
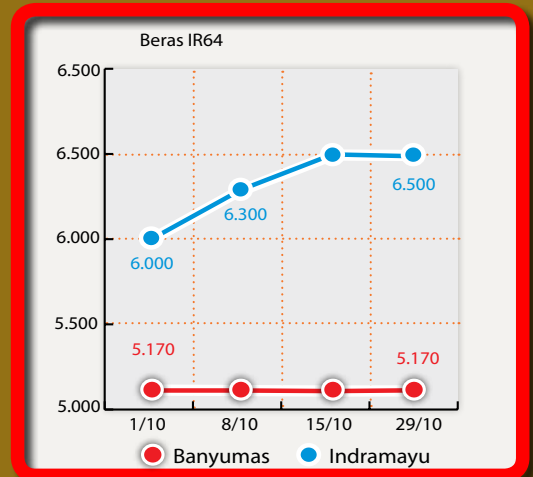
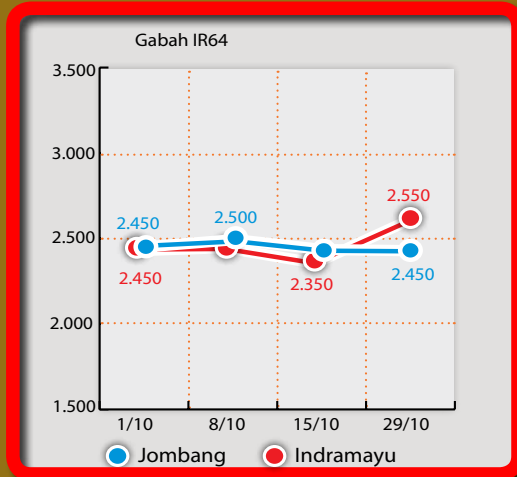
%, kemerosotan yang paling besar sejak 4 Oktober 2010. Sebelumnya, kontrak kopi naik 12 % dan menyentuh level tertingginya dalam dua tahun terakhir ini.

Sementara itu, harga kopi arabika juga anjlok di tengah prediksi adanya peningkatan produksi global dan harga yang disetir oleh spekulasi pasar.

Produksi kopi global mungkin akan meningkat menjadi 133 juta hingga 135 juta karung dalam tahun kopi 2010-2011 dari tahun lalu yang hanya 119,9 juta karung. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)

infoharga.bappebti.go.id



Pepaya Sahabat Sehat

Siapa yang tidak kenal dengan tanaman buah bernama pepaya? Pastinya, dari anak berumur Balita hingga usia sepuh, sangat kenal dengan buah pepaya. Itu karena manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

Tanaman yang satu ini, cukup melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Karena banyak dimanfaatkan baik sebagai buah, kudapan, maupun pengobatan alternatif.

Sehari-hari pepaya biasa dikonsumsi sebagai buah. Tetapi tidak jarang juga dikonsumsi sebagai salah satu bahan sayuran, misalnya buah pepaya muda disajikan dalam sayur asam. Dan, disaat hari Raya Lebaran, buah pepaya muda juga menjadi sayur pelengkap lontong opor. Hmm..., nikmat.

Selain itu, buah pepaya muda juga

menjadi salah satu pelengkap pada minuman cocktail. Dicampur dengan sirup dan es, hmmm..., nyammi.

Dilihat dari sejarahnya, pepaya bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Melainkan tanaman asli dari kawasan Mexico dan Kosta Rica. Konon, tanaman ini masuk ke wilayah Indonesia pada abad 19 yang dibawa oleh para saudagar berkebangsaan Spanyol. Dan diduga kuat, juga masuk ke wilayah Indonesia melalui bangsa Tiongkok. Karena didaratan Cina tanaman ini sudah dikenal sejak abad 16.

Masuknya tanaman pepaya ke Indonesia, semula dijadikan tanaman

hias dipekarangan rumah. Karena karakteristiknya yang mudah ditanam dan memiliki jenis beragam.

Kemudian setelah pengetahuan tentang manfaat pepaya semakin meluas, tanaman ini pun dibudidayakan secara komersial.

Dalam kurun tahun 1980-1994, tanaman pepaya mendapat prioritas penelitian oleh pemerintah. Hasilnya, pada tahun 1983 ditemukan 10 varietas unggulan. Perkembangan lebih lanjut tanaman ini, ditahun 1989-1990, Indonesia mampu mengekspor buah pepaya ke Singapura, Australia dan beberapa negara lainnya.

Asal nama pepaya yang lazim kita sebut saat ini ternyata berasal dari bahasa Belanda 'Papaja'. Dan oleh masyarakat Indonesia menjadi pepaya. Sedangkan bagi masyarakat Jawa Tengah disebut kates atau gandul. Dan dalam bahasa Sunda biasa juga disebut gedang.

Pepaya adalah monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan 3 kelamin : tumbuhan jantan, betina dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis". Buah ini mandul (tidak menghasilkan biji subur), dan oleh masyarakat kerap dijadikan bahan obat tradisional.

Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan

tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk.

Buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran (dioseng - oseng). Daging buah

masak dimakan segar atau sebagai campuran cocktail. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing.

Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang (oval) bila dihasilkan tanaman benci. Tanaman benci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan

buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya.

Bagian tengah bulan berongga. Bijinya berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp). Lendir itu untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya pepaya, biji bisa ditanam kembali yang diambil dari bagian tengah buah. ▲

Manfaat Tanaman Pepaya

Dibawah ini beberapa manfaat tanaman pepaya bagi kesehatan dan kecantikan para wanita;

Bekerja untuk sistem pencernaan.

Enzim pengurai protein yang terkandung di dalamnya, dapat mengisi pengeluaran saluran usus dan pankreas atau kelenjar ludah perut, memenuhi kurangnya getah lambung, bisa membantu mengurai protein dan pati, adalah pekerja tetap secara cuma-cuma bagi sistem pencernaan. Resep makanan merekomendasikan : campuran pepaya muda, pepaya mentah dikupas kulitnya, dipotong menjadi potongan kecil, dicampur dengan lombo, wijen putih, garam, gula, ketumbar, juice (jeruk) sitrun dan diaduk merata.

Meningkatkan daya tahan tubuh

Pepaya mengandung karotena dan kaya dengan vitamin C, mereka (pepaya) memiliki kemampuan antioksidan yang sangat kuat, membantu organisme memperbaiki jaringan,elenyapkan zat beracun, memperkuat daya tahan tubuh, mencegah dan mengobati sejumlah virus pneumonia atau radang paru-paru.

Rekomendasi resep makanan : Juice pepaya segar

Mengobati luka bakar

Daerah luka bakar dapat mengembangbiakkan bakteri yang merugikan, unsur efektif yang

terkandung dalam buah pepaya dapat melindungi sel penelan, meningkatkan fungsinya membunuh bakteri. Saat sistem kekebalan tubuh menyerang bakteri merugikan akan menghasilkan zat asam dan nitrogen, kedua zat ini rata-rata tidak baik bagi penyembuhan daerah luka bakar. Getah buah pepaya dapat mengurangi setengah dari total zat asam dan nitrogen, mempercepat proses pemulihan luka.

Cara pemakaian : lulurkan cairan pepaya dan daunnya ke permukaan daerah yang luka.

Mengencangkan payudara

Sejak dahulu pepaya muda diyakini sebagai buah terbaik dalam mengencangkan payudara, enzim pepaya yang banyak terkandung di dalamnya sangat membantu pertumbuhan payudara. Sedang hormon pengencang dan vitamin A yang banyak terkandung dalam enzim pepaya, dapat merangsang pengeluaran hormon wanita, dan merangsang indung telur mengeluarkan hormon betina, melancarkan kelenjar susu dan mencapai maksud mengencangkan payudara. Cara pemakaian : susu pepaya, pepaya dipotong-potong, kemudian di bikin juice dengan campuran susu dan kuning telur, lalu dicampur lagi dengan juice (jeruk) sitrun dan madu.

Menguruskan badan

Enzim pepaya muda adalah 2 kali lipatnya enzim pepaya matang. Ia (enzim) bukan saja dapat mengurai protein, karbohidrat bahkan dapat mengurai lemak, melenyapkan daging

lebih, mendorong proses metabolisme, dengan cepat mengeluarkan lemak berlebihan.

Untuk kecantikan kulit

Kadar vitamin C dalam pepaya adalah 48 kali lipatnya buah apel. Ditambah lagi dengan kemampuan cerna enzim pepaya, bisa dengan cepat mengeluarkan racun dalam tubuh, sangat bagus bagi kesegaran kulit dari dalam. Enzim pepaya yang terkandung di dalamnya dapat mendorong proses metabolisme kulit, membantu melumerkan lapisan kulit dan zat tanduk penuaan yang tertimbun di pori-pori, membuat kulit tampak lebih terang dan cerah. Bintang yang direkomendasikan : di negeri Miss Universe, Venezuela, dimana kulit para miss Universe ini selalu tampak begitu cerah dan penuh vitalitas. Menurut pembuktian, semua ini dikarenakan mereka sangat terampil memakai pepaya untuk merawat kulitnya. Misalnya masker pepaya campur buah persik. Cara pemakaian : Buah pepaya dan persik dibuang kulitnya, kemudian ditumbuk mengental, lalu dicampur dengan juice (jeruk) sitrun dan madu.

Batu ginjal

Untuk mencegah risiko batu ginjal, ambil tiga potong akar pepaya, kemudian rebus dengan satu liter air sampai mendidih, kemudian saring. Setelah dingin, campur dengan sedikit madu, lalu minum.

Memperlancar ASI

Sayuran buah pepaya mentah ini biasanya dimasak seperti halnya membuat sayur lodeh. Sebagai selingan, dapat dicampur dengan daging atau tempe. Jangan lupa, sebelum memasak, cuci buah untuk membersihkan kotoran dan mengurangi getahnya. ▲

PROSEDUR PENGAJUAN PERSETUJUAN SEBAGAI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM SISTEM RESI GUDANG

SISTEM RESI GUDANG merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan, karena Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi para petani dan dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Implementasi Sistem Resi Gudang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi para pemilik komoditi yang memanfaatkan sistem ini untuk memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagi para pelaku/lembaga yang berperan aktif dalam Sistem Resi Gudang.

Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga terakreditasi yang melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.

ALURAN PENGAJUAN PERSETUJUAN

Setelah memenuhi dan melengkapi semua ketentuan dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan di atas, kemudian Surat Permohonan beserta lampiran dan dokumen-dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui POS tercatat atau dengan menyerahkan ke Kantor BAPPEBTI.

**Pengajuan
Permohonan**

**Penelitian & Penilaian
Dokumen**

PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN

1. Sebelum mengajukan permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian, perusahaan/lembaga tersebut harus telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
2. Surat pengajuan permohonan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan kertas berkop perusahaan/lembaga dan berpedoman pada Model Formulir Nomor SRG-LPK01 perihal Permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dengan melampirkan :
 - a. Daftar Kelengkapan Dokumen Dalam Rangka Permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lampiran 1 Model SRG-LPK01);
 - b. Daftar Isian Permohonan Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (Lampiran 2 dari Model Formulir SRG-LPK01)
3. Selain Surat Permohonan Persetujuan Gudang beserta lampirannya, pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Dokumen legalitas hukum Lembaga Penilaian Kesesuaian ;
 - b. Struktur Organisasi dan Daftar Personil Lembaga Penilaian Kesesuaian;
 - c. Daftar Laboratorium yang relevan (apabila ada);
 - d. Sertifikasi Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) termasuk ruang lingkup akreditasinya;
 - e. Contoh Sertifikat Penilaian Kesesuaian;
4. Setelah semua persyaratan dan ketentuan tersebut di atas dipenuhi, Surat Permohonan beserta lampiran dan dokumen-dokumen tersebut kemudian dimasukkan kedalam amplop tertutup (ukuran folio) dan diberi judul.

KEPADA YTH :

Kepala Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan RI
Gedung BAPPEBTI Lt. 3-5
Jalan Keramat Raya No 172
Jakarta 10430

(Dokumen Permohonan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian)

**Surat Penolakan
Beserta alasan**

**Pemeriksaan
Sarana & Prasarana**

**Surat & Sertifikat
Persetujuan Kepala Bappebti**

BURSA BERJANGKA

• **Agustinus Yohanes** • Staf Pengajar Pascasarjana FEUI •

Derasnya arus dana asing yang mengalir ke Indonesia belakangan ini, tetap meninggalkan bom waktu. Suatu saat, apabila tidak dikendalikan secara baik, akan menyebabkan kemerosotan aset. Oleh sebab itu, menurut penulis yang dikutip dari *Investor Daily*, 18 Oktober 2010, di luar bursa saham, bursa berjangka komoditi menjadi jembatan utama masuknya aliran dana jangka pendek ke sektor industri berbasis komoditi.

Krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa telah menjadikan pasar keuangan Asia sebagai tempat yang menjanjikan profitabilitas yang tinggi. Pasar saham dikawasan Asia terus kebanjiran dana segar. Derasnya arus dana asing memicu rekor baru kenaikan berbagai indeks harga saham di berbagai bursa Asia. Kenaikan tertinggi indeks harga saham diantaranya negara-negara Asia dipegang Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tetapi, derasnya aliran dana yang masuk ke pasar keuangan Indonesia juga perlu diwaspadai. Nilai price earning ratio (PER) di BEI telah mencapai level yang tinggi sekitar 38 kali dibandingkan negara lain. pasar keuangan Indonesia sangat bergantung dengan dana jangka pendek ini. Pengalaman menunjukkan

ketika terjadi pembalikan arus dana, maka pasar modal Indonesia pula yang paling terpuruk dibandingkan pasar keuangan negara Asia lainnya.

Derasnya arus modal merupakan "rezeki" bagi para pelaku pasar mendapatkan portofolio dengan imbal hasil yang tinggi. Tetapi, aksi ambil untung yang dilakukan para investor akan mendorong terjadinya arus balik (capital outflow) yang menyebabkan kemerosotan harga aset keuangan yang dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan, bahkan perekonomian nasional. Arus balik modal juga bisa dipicu oleh perbaikan perekonomian AS, Jepang, dan negara-negara Eropa dari krisis keuangan yang melanda mereka.

Arahkan ke pasar komoditas

Dari pengalaman krisis Asia tahun 1997, mengendalikan resiko keuangan menjadi hal sangat penting dalam memanfaatkan

arus dana panas yang masuk. Pengelolaan arus modal jangka pendek mencegah kita agar tidak terjebak dalam gelembung ekonomi semu. Kemampuan pengelolaan ini tidak hanya terbatas pada hal yang berkaitan dengan regulasi keuangan saja, tetapi sejauh mana pemerintah mampu menerapkan perubahan yang berkaitan dengan birokrasi, infrastruktur, dan penegakan hukum yang mendorong kondisi kondusif untuk tumbuhnya sektor riil.

Pengelolaan resiko menjadi kata kunci menghadapi tingginya volatilitas pasar. Kapasitas pasar keuangan kita untuk menyerap limpahan modal yang mencapai miliaran dollar AS sangat terbatas. Kapasitas pasar saham Indonesia menunjukkan angka yang relatif masih kecil, yaitu sekitar Rp. 2.900an triliun. Keterbatasan daya serap pasar keuangan dibandingkan derasnya dana yang masuk ke pasar menyebabkan pasar menjadi cepat panas.

Harga saham secara cepat melambung tinggi yang menyebabkan terjadinya penggelembungan aset.

& PENGELOLAAN RISIKO

Implikasinya dapat mengejutkan. Jika dana tersebut keluar dari pasar, maka harga aset merosot secara cepat yang menyebabkan kerugian secara masif. Ini yang bisa mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi lebih lanjut.

Makanya diluar bursa saham, ada bursa berjangka yang bisa menjadi jembatan masuknya aliran dana jangka pendek ke sektor industri komoditas, sehingga pasar keuangan indonesia menyerap arus dana jangka pendek lebih besar. Aliran dana jangka pendek yang masuk ke pasar komoditas dapat diarahkan untuk transaksi-transaksi yang dapat menyentuh ekonomi sektor riil yang berbasis komoditas, seperti perdagangan olein, emas, crude palm oil (CPO), dan produk komoditas lainnya yang dikembangkan di bursa berjangka kita. Bursa berjangka (futures) dapat bermanfaat sebagai sarana pengelolaan risiko dan dana jangka pendek yang sedang masuk mengalir deras.

Selain peningkatan kapasitas daya serap, bursa berjangka menjadi sarana hedging (lindung nilai) dalam suatu kondisi pasar keuangan dengan volatilitas yang tinggi seperti saat ini. Peranan bursa berjangka bagi para pelaku pasar dapat

dimanfaatkan melindungi portofolio aset dari risiko pasar. Komoditas merupakan bagian dari komponen risiko. Lindung nilai aset dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar berjangka yang dikembangkan oleh Bursa Berjangka Jakarta.

Transaksi yang terjadi di pasar komoditas saat ini memang masih sangat rendah. Bandingkan dengan transaksi perdagangan di bursa saham yang mencapai Rp. 8 Triliun per hari. Rendahnya transaksi di pasar komoditas merupakan gambaran rendahnya pengelolaan risiko pasar para pelaku usaha di Indonesia. Di berbagai negara maju, pasar berjangka merupakan sarana pengelolaan risiko pasar dari pengaruh fluktuasi harga.

Tiada kepastian harga dan penjualan dari suatu pasar yang efisien yang menyebabkan industri komoditas memiliki posisi tawar yang lemah untuk mendapatkan pembiayaan pengembangan industrinya.

Sarana Pengelolaan Risiko

Pasar berjangka komoditas (futures market) bermanfaat sebagai lindung nilai (hedging) bagi para pelaku usaha.

Kemampuan ini menentukan perkembangan industri, tidak hanya industri yang berbasis komoditas tetapi juga industri terkait dengannya. Risiko industri yang terukur mendorong industri perbankan lebih aktif menyalurkan kreditnya sesuai standarisasi BASEL II yang memasukkan risiko pasar dalam perhitungan risiko.

Komoditas adalah salah satu komponen dari risiko pasar. Bursa komoditas dapat dijadikan panutan harga dimana proses pembentukan harga komoditas terbentuk secara efisien di pasar yang digunakan sebagai acuan menentukan tingkat risiko pasar. Perbankan selama ini kesulitan menentukan tingkat risiko untuk industri berbasis komoditas perkebunan dan pertambangan.

Bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko penting perannya dalam pasar dengan volatilitas yang tinggi saat ini. Kita sering lupa ketika nilai portofolio sedang meningkat tajam, tapi terkejut ketika pasar terperosok. Pengelolaan risiko menjadi penting disana. ▲

Tetti Erlinda Gultom

'Nyonya Besar' MPF Medan

Ulet, kerja keras, berani dan ditambah sedikit keberuntungan itulah yang mungkin membawa Tetti Erlinda Gultom didapuk sebagai Kepala Cabang PT Millenium Penata Futures (MPF), yang berada di Jl. S. Parman, Medan, Sumut. Tidak sampai disitu, Tetti, demikian dia akrab dipanggil, masih diberi tanggungjawab sebagai kordinator dari lima cabang MPF yang ada di Kota Medan.

Dua jabatan prestisius itu mulai diembannya sejak September 2010. Tepatnya, sejak cabang MPF Jl. S. Parman beroperasi. Sebelumnya, cabang itu berdomisili di Jl. Listrik, Medan, dan cabang inilah cikal bakal MPF melebarkan sayap di Medan, hingga memiliki lima kantor cabang.

"Pada dasarnya tanggungjawab saya hanya mengkoordinasikan antar cabang untuk tidak saling berebut 'lahan' nasabah. Dan tentunya menjaga integritas perusahaan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan," ujar Tetti.

Perjalanan karier wanita kelahiran Medan, Sumut, 9 April 1976, ini, sudah diawali ketika masih menyangand mahasiswa. Tahun 2004, dia sudah tercatat menjadi tenaga marketing MPF. Tak puas menjadi tenaga marketing, tahun 2006 disabet izin Wakil Pialang Berjangka (WPB). Dan ditahun yang

sama, dia pun berhasil menuntaskan pendidikan dari STIE Tri Darma Widya, Jakarta.

Setelah izin WPB dikantongi, tantangan pun diberikan manajemen MPF kepadanya. Masih di tahun 2006, dia salah satu dari tim yang ditunjuk merintis membuka cabang MPF di DI Yogyakarta.

Selama di kota gudeg itu, Tetti pun memperoleh keberuntungan ganda. Karier melejit dan calon suami pun ditemukannya. 'Pangeran' itu adalah Arianto Tinambunan. Pegawai Bapeda, Medan, itu, kebetulan sedang menuntut ilmu S2, di Universitas Gajah Mada.

Gayung bersambut, mahliga keluarga pun diresmikan pada tahun 2007. Dan buah cinta kasih mereka kini hadir satu anak laki-laki bernama Van Lith Utomo, 3 tahun.

Karena harus mengikuti suami yang bekerja di pemerintahan Kota Medan, itu, Teti pun merintis kembali kariernya di MPF cabang Medan. Tahun 2008, dia kembali menjadi WPB MPF. Dan kini menjadi Kepala Cabang MPF di Jl. S. Parman, Medan. Serta, menjadi kordinator dari lima cabang MPF di kota itu.

Menurut Ibu yang hobi memasak ini, potensi perdagangan berjangka komoditi di Kota Medan dan khususnya di Sumut, cukup tinggi. "Mungkin hal itu dikarenakan karakteristik

masyarakatnya yang suka menghadapi tantangan," jelasnya.

Tetapi diakuinya, kontrak berjangka yang diminati nasabah Medan adalah kontrak keuangan. "Investor disini lebih menyukai bertransaksi valas. Mungkin saja itu untuk kepentingan bisnis dan juga memang pergerakan harganya tidak terlalu berfluktuasi."

"Kalau kontrak indeks investor Medan kurang senang. Karena pergerakan harganya cukup cepat, dan mereka tidak banyak waktu untuk memantau," ungkap Tetti.

Sementara itu, kontrak multilateral menurut Teti, belum diminati investor Medan. "Mungkin dikarenakan mereka sudah terbiasa bertransaksi produk keuangan."

"Inilah tantangan bagi kami. Karena hal itu sudah kewajiban sesuai peraturan Bappebti. Apa lagi Provinsi Sumut dikenal sebagai salah satu sentra komoditi primer nasional dan pelakunya cukup banyak di sini," tegasnya.

Upaya yang kami lakukan, tambah Teti, adalah mengedukasi investor. Mengenalkan apa manfaatnya bagi mereka dan masyarakat secara umum. Strateginya, kami sudah melakukan berbagai training dan mengundang manajemen bursa untuk bersosialisasi.

"Tentunya hasilnya tidak seperti menggigit cabe, langsung dirasakan. Pasti perlu waktu dan tak boleh putus dilakukan pendekatan," tandas Tetti. ▲